BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak sesuai dengan konsep pelaksanaan akad *bay' al-wafā'*. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada skema pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di mana pihak pembeli (BMT) menyewakan kembali barang yang diperjualbelikan kepada penjual semula (pertama) dengan menggunakan akad *bay' al-istighlāl*; ketentuan barang yang diperjualbelikan menggunakan barang bergerak seperti sepeda motor atau kendaraan roda empat; cara pengambilan keuntungan dengan pembeli (BMT) menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama), dan cara pembelian kembali barang yang diperjualjualbelikan pada saat jatuh tempo dengan mengangsur setiap bulannya.
2. Pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* kurang tepat jika digunakan pada pembiayaan modal kerja karena jika dilihat definisi dan aplikasi pembiayaan modal kerja lebih tepat jika menggunakan akad *muḍārabah* atau akad *mushārakah* yang mana akad tersebut merupakan akad kerja sama dalam rangka mendapatkan modal dengan sistem bagi hasil. Selain akad *muḍārabah* atau akad *mushārakah*, pihak BMT juga bisa menggunakan akad *rahn* pada pembiayaan modal kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo diharapkan menggunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* sesuai teori agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. Pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo seharusnya lebih memberikan pengawasan berkala terhadap perkembangan usaha *debitur* yang berubah-ubah setiap bulannya dan membantu dalam pembuatan laporan keuangan secara rinci agar memudahkan pihak *debitur* dalam menjalankan akad *muḍārabah* atau akad *mushārakah* pada pembiayaan modal kerja.
3. Pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo seharusnya lebih proaktif dalam memberikan keterangan yang jelas dan pemahaman yang melekat kepada anggota atau *debitur* atas akad yang sedang dilaksanakan atau dipakai agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.
4. Kekurangan dari penelitian ini adalah peneliti belum menyentuh eksistensi (keberadaan) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dikarenakan keterbatasan waktu. Oleh sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, perlu adanya penelitian lanjutan terkait eksistensi DPS terhadap pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada pembiayaan modal kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id